

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat secara tepat dan cermat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu satu periode (Ernawijaya, 2015). Anggaran yang telah disusun akan digunakan oleh pihak manajemen untuk mengarahkan jalannya kondisi organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut Rudianto (2002) terdapat dua fungsi utama dari anggaran, antara lain :

a. Sebagai alat perencanaan

Anggaran digunakan untuk mengarahkan seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi agar terarah.

b. Sebagai alat pengendalian

Anggaran digunakan sebagai standar dan tolak ukur kegiatan yang dilakukan organisasi. Tanpa anggaran, maka dapat terjadi pemborosan yang berlebih dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijabarkan, maka anggaran merupakan suatu rencana keuangan organisasi yang harus disusun secara terorganisasi rapi, jelas dan komprehensif berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk periode tertentu atau jangka waktu yang akan datang.

2.1.1.2 Anggaran Sektor Publik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu pedoman tindakan yang dijalankan oleh pemerintah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk periode tertentu. Selain itu anggaran juga dapat digunakan sebagai alat bantu pemerintah untuk mengalokasikan keterbatasan sumber daya dana dan sumber daya alam yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan cita-cita pemerintahan (Threzasyari, 2010).

Dari beberapa penjelasan yang telah dijabarkan, maka anggaran sektor publik adalah rencana keuangan pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk finansial untuk satu atau beberapa periode yang akan datang. Anggaran

sektor publik akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Bastian (2010) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penganggaran sektor publik bersifat sangat dinamis dan dapat diakomodasi secara utuh dalam sistem penganggaran publik, adapun prinsip-prinsip anggaran sektor publik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Demokratis

Anggaran harus tetap mengikutsertakan unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.

b. Terbuka

Anggaran harus diketahui oleh masyarakat umum, bukan hanya diketahui oleh pihak legislatif dan wakil rakyat.

c. Keadilan

Anggaran harus bertujuan untuk dialokasikan ke semua masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan haruslah adil.

d. Tanggungjawab

Penyusunan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

e. Beretika dan bermoral tinggi

Anggaran yang disusun mengacu pada etika dan moral yang tinggi serta bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Berhemat

Anggaran harus disusun dengan tepat dan cermat, karena keterbatasan dan mahalanya sumber daya yang ada.

2.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan suatu rencana tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Nordiawan dkk (2012) dalam APBD terdapat beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi otorisasi

Dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja APBD pada tahun yang bersangkutan adalah Perda tentang APBD.

b. Fungsi pengawasan

Tolak ukur dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah APBD.

c. Fungsi perencanaan

Pedoman dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun yang bersangkutan adalah APBD.

d. Fungsi alokasi dan fungsi distribusi

Anggaran APBD dapat meminimalisir pemborosan sumber daya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian serta APBD harus dapat menciptakan lapangan kerja.

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun 2017 terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan APBD Tahun 2017, antara lain :

a. Anggaran yang dibuat atau disusun harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, ekonomi, efisiensi, efektif dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan rasa kepatuhan, keadilan dan manfaat untuk seluruh masyarakat.

- a. Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Anggaran harus tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
- d. Adanya kemudahan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD bagi khalayak umum atau masyarakat.
- e. Harus melibatkan beberapa unsur masyarakat dalam penyusunan APBD.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijabarkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah yang disusun dengan tujuan agar pemerintahan daerah dapat mengatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan atau program-program pembangunan daerah.

2.1.2 Penekanan Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Penekanan anggaran

Suatu anggaran diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk menentukan prestasi dan kinerja karyawan. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005) anggaran yang dibuat sering kali membuat orang-orang akan merasakan suatu tekanan, karena saat atasan berusaha untuk memperbaiki efisiensi dengan cara memperoleh lebih banyak output dari tingkat input yang ada atau lebih rendah.

Kusniawati dan Lahaya (2017) menjelaskan bahwa penekanan anggaran terjadi ketika adanya pemberian kompensasi atau bonus dari atasan kepada bawahan, jika bawahan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Serta pemberian denda atau sanksi jika bawahan tidak dapat mencapai target anggaran tersebut.

Jadi penekanan anggaran merupakan suatu alat yang digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam organisasi. Adanya penekanan anggaran mengakibatkan karyawan menjadi tegang, dan pada akhirnya akan membuat karyawan melakukan berbagai tindakan yang disfungsi guna menghindari tekanan yang berlebih dalam penyusunan anggaran serta untuk meningkatkan

penilai yang baik dengan harapan akan memperoleh bonus dari hasil kinerjanya.

2.1.2.2 Indikator Penekanan Anggaran

Terdapat beberapa indikator penekanan anggaran menurut Armaeni (2012) dalam Riandalas (2014), yaitu :

a. Anggaran sebagai pengendalian kinerja

Anggaran yang dibuat atau telah ditetapkan sebelumnya digunakan sebagai pengendali atau pengawasan terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi tersebut.

b. Anggaran sebagai tolak ukur kinerja

Anggaran digunakan untuk menilai baik atau tidaknya kinerja dari karyawan.

c. Anggaran menuntut pencapaian target

Anggaran digunakan untuk menuntut karyawan untuk pencapaian target anggaran yang telah dibuat sebelumnya.

d. Anggaran meningkatkan kinerja

Anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja kerja dari karyawan.

e. Adanya *reward* ketika pencapaian target anggaran

Anggaran dapat digunakan untuk menilai pencapaian target anggaran, sehingga akan

diberikannya *reward* atau hadiah dari pencapaian target tersebut.

- f. Kompensasi keberhasilan atas pencapaian target
Adanya pemberian kompensasi kepada karyawan tersebut atas keberhasilannya dalam mencapai target anggaran yang telah dibuat.

2.1.3 Informasi Asimetri

2.1.3.1 Pengertian Informasi Asimetri

Suatu organisasi baik itu swasta ataupun publik, pasti melibatkan beberapa orang untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan atau program yang hendak dilakukan dan hal tersebut mengakibatkan adanya berbagai macam informasi. Menurut Marfuah dan Listiani (2014) informasi asimetri adalah suatu keadaan dimana atasan tidak mempunyai informasi yang cukup perihal kinerja bawahan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual organisasi. Adanya informasi asimetri mendorong pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, dimana partisipasi dari bawahan inilah yang dapat memberikan kesempatan untuk memasukkan informasi lokal (Prakoso, 2016).

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan, maka informasi asimetri adalah suatu kondisi

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara dua pihak atau lebih dalam organisasi. Adanya informasi asimetri mengakibatkan terjadinya konflik antara pihak satu dengan pihak yang lain, untuk saling memanfaatkan dan bersikap oportunitis atau tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

2.1.3.2 Indikator Informasi Asimetri

Terdapat beberapa indikator dari informasi asimetri menurut Rukmana (2013), antara lain :

- a. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak satu dengan pihak yang lainnya (atasan dan bawahan)

Adanya perbedaan informasi merupakan salah satu tanda terjadinya asimetri informasi. Sering kali bawahan memiliki informasi yang lebih dalam organisasi dibandingkan dengan atasan.

- b. Pencapaian kinerja potensial

Bawahan yang ikut serta secara langsung dalam proses kegiatan unit dapat memperkirakan kinerja potensial unit tanggungjawabnya daripada atasan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses kegiatan unit organisasi.

- c. Pengetahuan antara hubungan input dan output kegiatan operasi internal

Sering kali bawahan lebih mengetahui hubungan input dan output operasi internal yang menjadi pertanggungjawabannya dalam organisasi.

- d. Dampak potensial terhadap aktifitas yang menjadi tanggungjawab

Mereka yang terlibat secara langsung dalam proses operasi organisasi dapat menilai dampak yang dapat terjadi pada bagian pertanggungjawabannya secara akurat.

- e. Pemahaman teknis pekerjaan yang dimiliki

Bawahan seringkali lebih mengetahui bagaimana cara unit tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan dari pada atasan.

2.1.4 Partisipasi Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Anggaran

Partisipasi merupakan bagian yang penting dalam bekerja pada suatu organisasi ataupun perusahaan, dimana proses penyusunan anggaran yang baik adalah dengan melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi didalamnya. Menurut Utami (2017) partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan pada luasnya partisipasi aparat pemerintah

daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan dan dibuat oleh unit kerjanya serta pengaruh pusat pertanggungjawaban dari anggaran mereka.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 5-10 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.

Jadi, dalam penyusunan anggaran APBD diperlukannya partisipasi dari berbagai unsur satuan kerja yang ada dalam pemerintahan daerah. Partisipasi anggaran sangatlah perlu, karena partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dalam penyusunan anggaran untuk bersama-sama mengambil peran guna mencapai sasaran anggaran serta tanggungjawab atas anggaran tersebut.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Partisipasi Anggaran

Menurut Sayputri (2017) terdapat 3 kelompok atau jenis dari partisipasi anggaran, yaitu :

a. Atasan ke bawahan (*top down approach*)

Manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah, sehingga pelaksana anggaran hanya melakukan apa saja yang telah disusun.

b. Bawahan ke atasan (*bottom up approach*)

Anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya diserahkan ke atasan untuk mendapatkan pengesahan.

c. Perpaduan antara *top down* dan *bottom up*

Perpaduan antara *top down* dan *bottom up* ini menekankan pada perlunya kerja sama antara atasan dan bawahan untuk menetapkan anggaran yang terbaik agar tujuan organisasi tercapai.

2.1.4.3 Kelebihan dan Kelemahan Partisipasi Anggaran

Ada beberapa manfaat dari adanya partisipasi anggaran, dimana penyusunan anggaran partisipatif dapat menjadi tempat pertukaran informasi. Menurut Mumpuni (2015) penyusunan anggaran partisipatif juga dapat meningkatkan kecenderungan yang lebih besar dari karyawan untuk menerima tujuan anggaran yang telah ditetapkan, karena karyawan akan merasa ikut serta memegang kendali.

Lubis (2010) menjelaskan bahwa selain mempunyai kelebihan, partisipasi anggaran juga memiliki beberapa kelemahan antara lain :

- a. Partisipasi anggaran menyebabkan tolak ukur atau standar anggaran yang terlalu tinggi, dimana hal tersebut dapat menyebabkan bawahan akan membuat *budgetary slack* untuk menyediakan suatu margin keselamatan dalam memenuhi tujuan yang dianggarkan.
- b. Terdapat partisipasi semu atau *pseudo participation*. Ikut serta dalam partisipasi tetapi tidak diberi kewenang atau opini untuk menetapkan dan menentukan isi dari anggaran yang dibuat.

2.1.4.3 Indikator Partisipasi Anggaran

Menurut Sinaga (2013) ada beberapa indikator dari partisipasi anggaran, antara lain :

- a. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran
Adanya hak untuk mengajukan usulan anggaran dalam organisasi tersebut sesuai dengan tanggungjawab yang dimilikinya.
- b. Pengaruh terhadap penetapan anggaran
Besarnya pengaruh dalam hal ini menunjukkan seberapa besar peran dan keikutsertaan yang

diberikan karyawan terhadap keputusan anggaran final.

c. Pentingnya usulan anggaran

Kemampuan individu dalam memberikan usulan/ pendapat dari bawahan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

d. Kelogisan dalam anggaran

Kadang anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan keyakinan dalam membuat anggaran agar anggaran tersebut logis sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2.1.5 *Budgetary Slack*

2.1.5.1 Pengertian *Budgetary Slack*

Karena adanya keinginan untuk menghindari resiko dan mencari rasa aman, seringkali pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan *budgetary slack*.

Menurut Falikhatun (2007) *budgetary slack*, dapat terjadi jika keterlibatan bawahan dalam proses penyusunan anggaran tersebut disalah gunakan. Bawahan cenderung menganggarkan pendapatan lebih rendah dan

pengeluaran lebih tinggi dari realisasi, agar target anggaran lebih mudah untuk dicapai (Sundari, 2015).

Prakoso (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dilakukannya tindakan *budgetary slack*, antara lain :

- a. Jika keberhasilan atau prestasi kerja seseorang dinilai dari keberhasilan dan prestasi dalam mencapai anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Untuk membangun kepercayaan orang-orang bahwa ketika anggaran dapat tercapai, maka mereka akan terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata atasan.
- c. Untuk mengatasi kondisi ketidakpastian yang terjadi dalam proses penyusunan anggaran.

Menurut Yeandrawita (2015) *budgetary slack* yang terjadi didalam pemerintahan tidak menciptakan prinsip anggaran sektor publik dalam pemerintahan, sehingga tidak tercapainya tujuan kinerja yang baik dalam pemerintahan.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan, maka *budgetary slack* merupakan selisih atau perbedaan antara anggaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilakukan dalam anggaran atau realisasi, guna pencapaian target yang mudah.

2.1.5.2 Indikator *Budgetary Slack*

Menurut Rukmana (2013) ada beberapa indikator dari *budgetary slack*, antara lain :

a. Pengaruh anggaran dalam mendorong produktivitas

Anggaran yang telah dibuat atau ditetapkan, membuat bawahan akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya atau meningkatkan produktivitasnya agar anggaran yang dibuat bisa tercapai. Sehingga kinerja karyawan akan terlihat baik dimata atasannya.

b. Pencapaian anggaran dalam pelaksanaan kerja

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi, maka akan berusaha yang terbaik demi kepentingan dan tujuan dari organisasi tersebut. Mereka akan berusaha untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan tersebut.

c. Pengawasan atau monitoring dalam penggunaan anggaran

Karena adanya keterbatasan dalam penggunaan anggaran, maka karyawan harus memonitor setiap pengeluaran atau penggunaan anggaran agar sesuai dengan target yang telah dianggarkan.

- d. Tidak adanya tuntutan pada anggaran

Anggaran yang dibuat tidak terlalu tinggi. Sehingga karyawan tidak merasa tertekan untuk mencapai anggaran. Mereka akan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak terburu-buru untuk mencapai anggaran.

- e. Target anggaran tidak mendorong tingkat efisiensi

Karena adanya tuntutan dari atasan untuk mencapai target anggaran, membuat karyawan tidak perlu meningkatkan efisiensi agar target anggaran segera dicapai dan kinerja karyawan akan terlihat baik jika mampu mencapai anggaran.

- f. Target atau sasaran susah untuk direalisasi

Target atau sasaran anggaran tidak mudah untuk dicapai, oleh karena itu karyawan menyusun anggaran tidak sesuai dengan estimasi terbaik yang bisa dilakukan.

2.1.6 Locus Of Control

2.1.6.1 Pengertian Locus Of Control

Menurut Permanasari (2014) konsep *locus of control* menunjukkan kepada keyakinan-keyakinan pada diri seseorang perihal penyebab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. *Locus of control* didefinisikan sebagai

keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal (Triana dkk, 2012).

Menurut Pello (2014) *locus of control* internal menggambarkan keyakinan yang didominasi oleh diri sendiri, sedangkan *locus of control* eksternal menggambarkan keyakinan seseorang bahwa keberhasilan dan perilaku dalam bekerja dikarenakan faktor dari luar diri mereka.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka *locus of control* adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang terdapat pada diri seseorang dalam memandang suatu penyebab dari kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya.

2.1.6.2 Konsep Dasar *Locus Of Control*

Menurut Rotter (2006) dalam Prameswari (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa konsep dasar *locus of control*, antara lain :

a. Harapan

Suatu kemungkinan dari berbagai peristiwa yang akan dialami oleh individu.

b. Potensi perilaku

Setiap kemungkinan yang sering muncul pada situasi tertentu yang berkaitan dengan hasil yang diinginkan oleh individu.

c. Suasana psikologis

Bentuk rangsangan atau pancingan baik secara internal ataupun eksternal pada situasi tertentu yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan harapan terhadap hasil yang diinginkan oleh individu.

d. Nilai unsur keyakinan

Keyakinan pada hasil dari berbagai pilihan yang ada, dimana hasil yang berbeda dapat muncul pada keadaan yang serupa.

2.1.6.3 Indikator *Locus Of Control*

Ada beberapa indikator dari *locus of control* menurut Sinaga (2013), yaitu :

a. Segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan

Menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan didapatkan bukanlah hasil dari keberuntungan.

b. Kepercayaan adanya takdir

Kepercayaan adanya takdir yang telah menentukan hasilnya dalam hal apapun.

c. Kerja keras dan usaha sendiri

Kepercayaan bahwa apa yang diinginkan dan dilakukan adalah dari diri sendiri dan kerja keras yang telah dilakukan.

d. Kepercayaan diri

Keyakinan dalam diri sendiri bahwa mampu untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	Permanasari (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Anggaran 2. Komitmen Organisasi 3. Penekanan Anggaran 4. <i>Locus Of Control</i> 5. Kohensivitas Kelompok <p>Variabel Dependen : Senjangan Anggaran</p>	<p>Kelima variabel independen yaitu partisipasi anggaran, komitmen organisasi, penekanan anggaran, <i>locus of control</i> dan kohensivitas kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran di Pemerintah Provinsi Riau</p>
2	Savitri dan Sawitri (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Anggaran 2. Penekanan Anggaran 3. Informasi Asimetri 4. <p>Variabel Dependen : Senjangan Anggaran</p>	<p>Ketiga variabel yaitu partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan informasi asimetri berpengaruh pada <i>budgetary slack</i> (senjangan anggaran) dalam proses penyusunan anggaran di SKPD Pemerintahan Kabupaten Kampar</p>

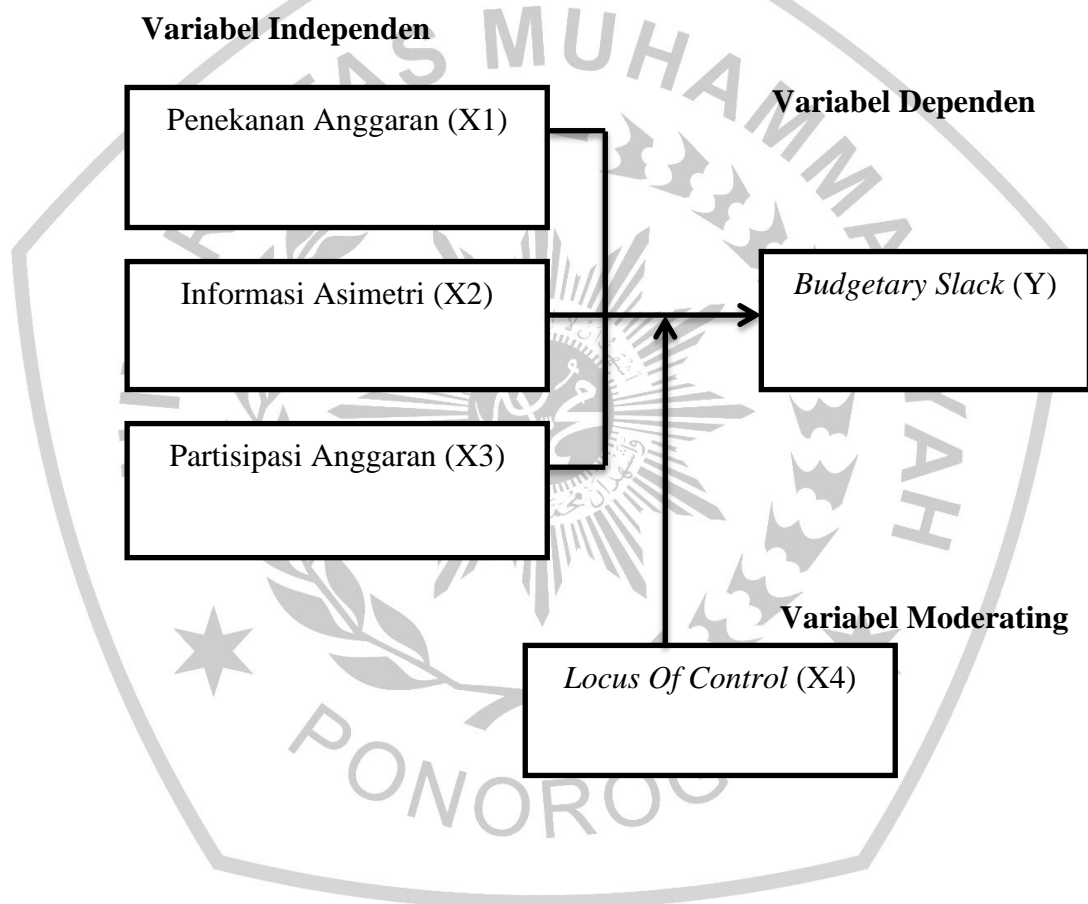
3	Sundari (2015)	<p>Variabel Independen : Partisipasi Anggaran</p> <p>Variabel Dependen : Senjangan Anggaran</p> <p>Variabel Moderating : 1. Informasi Asimetri 2. Penekanan Anggaran 3. Komitmen Organisasi 4. <i>Locus Of Control</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran 2. <i>Locus of control</i> berpengaruh terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran
4	Putra dkk (2015)	<p>Variabel Independen : 1. Partisipasi Anggaran 2. Informasi Asimetri 3. Penekanan Anggaran</p> <p>Variabel Dependen : Senjangan Anggaran</p>	Partisipasi anggaran, informasi asimetri dan penekanan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap senjangan anggaran
5	Lestara dkk (2016)	<p>Variabel Independen : 1. Asimetri Informasi 2. Penekanan Anggaran 3. Kapasitas Individu</p> <p>Variabel Dependen : Senjangan Anggaran</p> <p>Variabel Moderating : <i>Locus Of Control</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial dapat diketahui bahwa asimetri informasi, penekanan anggaran dan kapasitas individu berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Gianyar 2. <i>Locus of control</i> dapat memoderating hubungan ketiga variabel penelitian terhadap senjangan anggaran. Jika <i>locus of control</i> semakin tinggi, maka senjangan anggaran juga semakin tinggi
6	Nopriyanti (2016)	<p>Variabel Independen : 1. Partisipasi Anggaran 2. Penekanan Anggaran 3. Komitmen Organisasi 4. <i>Locus Of Control</i> 5. Kompleksitas Tugas</p> <p>Variabel Dependen : Senjangan Anggaran</p>	Kelima variabel yaitu partisipasi anggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasi, <i>locus of control</i> dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap senjangan anggaran di Pemerintahan Kabupaten Agam

Sumber : Data diolah dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian yang terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pikiran disusun untuk mempermudah untuk memahami hipotesis yang dibangun di dalam penelitian. Maka kerangka pikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikiran



2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Penekanan Anggaran Terhadap *Budgetary Slack*

Ketika anggaran dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja karyawan dalam organisasi, maka karyawan tersebut cenderung akan melakukan berbagai hal untuk dapat meningkatkan kinerjanya (Agasta dan Murtini, 2014).

Apabila beban daerah terlalu tinggi sedangkan pendapatannya hanya biasa-biasa saja maka kemungkinan terjadinya *budgetary slack* menjadi sangat tinggi (Nopriyanti, 2016). Hal seperti inilah yang menjadi alasan bawahan untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan tindakan *budgetary slack*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2014) menunjukkan bahwa variabel penekanan anggaran dalam penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan dan positif pada variabel *budgetary slack*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penekanan anggaran dapat terjadi karena adanya pemberian hadiah jika karyawan dapat mencapai target anggaran dan sanksi atau denda jika perencanaan anggaran tidak tercapai. Hal ini dapat diartikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan digunakan sebagai tolak

ukur kinerja, dengan pemberian hadiah atau denda atas tercapai atau tidaknya anggaran.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Sawitri (2014), Putra dkk (2015), Lestara dkk (2016), dan Nopriyanti (2016) yang mendapatkan hasil yang sama pula yaitu penekanan anggaran dapat berpengaruh terhadap *budgetary slack*.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho₁ = Penekanan anggaran tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*

Ha₁ = Penekanan anggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack*

2. Pengaruh Informasi Asimetri Terhadap *Budgetary Slack*

Adanya informasi asimetri merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perilaku negatif dari keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, dalam hal ini adalah *budgetary slack*. Menurut Savitri dan Sawitri (2014), ketika informasi bawahan lebih baik daripada atasan maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi penganggaran yaitu dengan tidak memberikan seluruh informasi yang dimilikinya dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2015) menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh signifikan dan positif terhadap *budgetary slack*. Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan. Namun karena adanya informasi asimetri atau perbedaan informasi yang dimiliki, dimana informasi bawahan lebih baik daripada atasan maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi penganggaran dengan melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan organisasi yaitu *budgetary slack*.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Sawitri (2014) dan Lestara dkk (2016) yang menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *budgetary slack* artinya apabila informasi asimetri semakin meningkat maka akan meningkat pula *budgetary slack* dan peningkatan signifikannya.

Berdasarkan beberapa uraian dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₀₂= Informasi asimetri tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*

H_{a2}= Informasi asimetri berpengaruh terhadap *budgetary slack*

3. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack*

Partisipasi anggaran adalah suatu proses yang melibatkan atau mengikutsertakan beberapa pihak yang mempunyai dampak terhadap masa depan dalam penyusunan anggaran. Terdapat kelemahan yang mungkin timbul sebagai akibat dari partisipasi anggaran. Menurut Ikhsan (2010) kelemahan dari partisipasi anggaran adalah dengan adanya anggaran partisipatif akan menimbulkan tolak ukur atau standar anggaran yang mendorong bawahan untuk *budgetary slack* dalam anggaran. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack*.

Penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2014) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack* yang artinya jika partisipasi anggaran yang dilakukan oleh bawahan semakin besar, maka *budgetary slack* juga akan semakin tinggi. Hal ini selaras dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Sawitri (2014), Putra dkk (2015), Sundari (2015) dan Nopriyanti (2016) yang juga menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack*.

Berdasarkan beberapa uraian dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₀₃ = Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*

H_{a3} = Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *budgetary slack*

4. *Locus Of Control* dalam Memoderating Pengaruh Penekanan Anggaran, Informasi Asimetri dan Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack*

Menurut Falikhatun (2003) dalam Desmayani dan Suardikha (2016) kecenderungan terjadinya senjangan anggaran, peningkatan kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor keadaan dan diri sendiri. Jika dikaitkan dengan penekanan anggaran, mereka yang memiliki *locus of control* yang buruk akan melakukan tindakan oportunitis, karena anggaran menuntut kinerja mencapai target anggaran.

Berdasarkan teori *locus of control*, perilaku seorang yang ikut serta dalam penyusunan anggaran akan dipengaruhi oleh karakteristik *locus of control*. Seseorang dengan *locus of control* dengan baik maka dia akan memberikan semua informasi yang dimilikinya agar tercapainya anggaran yang seharusnya atau sesuai.

Seseorang yang tidak memiliki *locus of control* yang baik akan gagal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja menjadi indikasi gagalnya partisipasi anggaran yang pada gilirannya akan

berdampak pada penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga berakibat timbulnya *budgetary slack* (Sinaga, 2013).

Berdasarkan beberapa uraian dan hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho₄= *Locus of control* tidak dapat memoderating pengaruh penekanan anggaran, informasi asimetri dan partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack*

Ha₄= *Locus of control* dapat memoderating pengaruh penekanan anggaran, informasi asimetri dan partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack*

